

DAFTAR PUSTAKA

- AH Tax Consulting. (2020, Juni 16). *Laporan Realisasi PPh 21 DTP dengan Format Baru*. Diambil kembali dari Tax Consulting: <https://www.ah-taxconsulting.com/laporan-realisasi-pph-21-dtp-dengan-format-baru/>
- Andriani P. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Asqolani. (2020). *Perpajakan II*. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. (2022). *Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2022*. Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang.
- Diaz Priantara. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (SE DJP Nomor SE-43/PJ/2020)*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Kemenkeu. (2021, September 2). *Insentif Perpajakan Didesain Untuk Menolong Masyarakat dan Dunia Usaha*. Diambil kembali dari Kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/insentif-perpajakan-didesain-untuk-menolong-masyarakat-dan-dunia-usaha/>
- Kementerian keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Kementerian Keuangan.

- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Pengajuan Permohonan Ulang Insentif PMK 9/2021 Jadi Topik Terpopuler*. (2021, Februari 13). Diambil kembali dari Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia: <https://atpetsi.or.id/pengajuan-permohonan-ulang-insentif-pmk-9-2021-jadi-topik-terpopuler>
- Pranita, Ellyvon;. (2020, Mei 11). *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?page=all>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Sembiring, L. J. (2021, Juni 22). *Insentif PPh 21 Diperpanjang, Gaji Utuh Sampai Akhir Tahun!* Diambil kembali dari cnbcindonesia.com.
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. London: Mathuen & Co LTD.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tommy. (2021, September 6). *Mengenal Lebih tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)*. Diambil kembali dari Pajakku.com: [https://www.pajakku.com/read/612ef8badcd4b57133ed20bd/Mengenal-Lebih-tentang-PPh-Pasal-21-Ditanggung-Pemerintah-\(DTP\)](https://www.pajakku.com/read/612ef8badcd4b57133ed20bd/Mengenal-Lebih-tentang-PPh-Pasal-21-Ditanggung-Pemerintah-(DTP))
- Wildan, Muhammad;. (2021, Juni 23). *Risiko Insentif PPh Pasal 21 DTP Tidak Diterima Pegawai, Ini Kata BPK*. Diambil kembali dari News.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/risiko-insentif-pph-pasal-21-dtp-tidak-diterima-pegawai-ini-kata-bpk-30780>